

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 726 TAHUN 2023

TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban layanan informasi publik perlu ditetapkan daftar informasi dikecualikan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pusat tentang Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
4. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat ini;
- KEDUA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- KETIGA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperbaharui secara berkala;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai bulan Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2023

Kepala Biro Hubungan Masyarakat



Kris Sasono Ngudi Wibowo

SALINAN Keputusan Kepala Biro ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis dan Pimpinan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
NOMOR 726 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu	
			Dibuka	Ditutup	Aktif	Inaktif
1	Lampiran surat BPK yang berisi daftar pemeriksaan dokumen kegiatan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dapat menghambat proses penegakan hukum	sampai keluar hasil pemeriksaan	
2	Berita acara pemeriksaan aparat hukum	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dapat menghambat proses penegakan hukum	sampai keluar hasil pemeriksaan	
3	Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan kalk) sebelum audit;	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selalu aktif	5 Tahun
4	Rencana penarikan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selalu aktif	6 Tahun
5	Rekening Koran bendaharawan	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selalu aktif	7 Tahun
6	Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selalu aktif	8 Tahun
7	Exercise/perhitungan RAPBN Kementerian Perindustrian (sebelum disampaikan dibahas DPR)	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selalu aktif	9 Tahun
8	Dokumentasi usulan revisi kegiatan dan anggaran	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selalu aktif	10 Tahun
9	Perencanaan kas harian, mingguan, dan bulanan yang belum diaudit	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selalu aktif	11 Tahun
10	Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selalu aktif	12 Tahun
11	Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum diaudit	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selalu aktif	13 Tahun
12	Kondisi keuangan pegawai, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai;	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan mengganggu privasi pegawai	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Permanen	

13	Hasil evaluasi terkait dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan pegawai	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan mengganggu privasi pegawai	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Permanen
14	Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis pegawai dan anggota keluarga	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan mengganggu privasi pegawai	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Permanen
15	Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan mengganggu privasi pegawai	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Permanen
16	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU. No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 butir 1 Perpres No.70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; pasal 66	Dapat mengungkap rahasia dagang	Mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.	Tahun berjalan (hingga berakhirnya kegiatan lelang)
17	Laporan keuangan yang belum diaudit	UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 30 ayat (1)	Dapat menimbulkan keresahan masyarakat karena data dan informasinya masih berubah	Mencegah timbulnya keresahan masyarakat karena data dan informasinya masih berubah	Informasi menjadi terbuka setelah pengesahan dari auditor/lembaga keuangan.
18	Informasi tentang profil calon investor yang mengusulkan dan memanfaatkan fasilitas tax holiday, bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP)	UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia Dagang Pasal 3 butir 2	Dapat mengungkap rahasia perusahaan	Informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.	Setelah perusahaan mendapat persetujuan masyarakat.
19	Data analisa, hasil uji/kalibrasi, dan Sertifikat Tanda Uji (STU)/sertifikat kalibrasi, baik dari perorangan maupun dari perusahaan	UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia Dagang Pasal 3 butir 2	Berpeluang menimbulkan persaingan tidak sehat	Mencegah kemungkinan persaingan tidak sehat	Permanen
20	Lampiran hasil pemeriksaan pegawai pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan mengganggu privasi pegawai	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Permanen
21	Dokumen Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan mengganggu privasi pegawai	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Permanen
22	Kondisi keuangan pegawai, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h butir 3	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Permanen
23	Riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis pegawai dan anggota keluarga.	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h butir 2	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Permanen
24	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan peserta diklat	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Permanen
25	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai ada keputusan tetap
26	Data hasil check up perorangan PNS/Pejabat	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak dapat diketahui secara umum oleh masyarakat	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
27	Hasil evaluasi terkait dengan kinerja, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h butir 4	Informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak dapat diketahui secara umum oleh masyarakat	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Permanen
28	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan berubah	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
29	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
30	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Keaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Mutasi, pensiun dn administrasi kepegawaian)	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Permanen
31	Proses penilaian penerimaan dan biodata calon peserta didik	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h butir 5	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Permanen
32	Naskah Soal Ujian Sekolah	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Selama masih berlaku
33	Hasil tes kemampuan calon peserta didik	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h butir 5	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Selama masih berlaku

34	Hasil Research and Development di bidang IPTEK yang belum mendapatkan HAKI	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, UU No.14 Tahun 2001 tentang paten pasal 3 ayat 1, UU desain industri No.31 Tahun 2000	Apabila informasi disampaikan kepada masyarakat sebelum diperoleh tanggal penerimaan permohonan paten (filing date) maka pengajuan paten atau desain industri dapat ditolak karena tidak baru.	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI
35	Formula /Hasil penelitian yang didaftarkan untuk rahasia dagang	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Mendapat perlindungan karena informasi tersebut berifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya.	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Permanen
36	Isi perjanjian lisensi hasil litbag yang telah dipatenkan	UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 9 dan UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan i	Mencegah kemungkinan timbulnya persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Permanen
37	Copy/salinan spesifikasi teknis untuk masing-masing pekerjaan yang telah ditetapkan oleh PPK.	UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b	Informasi terkait kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Permanen
38	Dokumen milik lembaga sertifikasi	UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b	Informasi terkait kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Permanen
39	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i	Jika ada pemeriksaan dari instansi Berwenang	Merugikan penyusunan kebijakan	Tidak terbatas
40	Dokumen kerjasama dengan industri	UU No. 14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h	Diberikan dengan menutup data pribadi	Munculnya persaingan tidak sehat	Tidak terbatas
41	Kode akses zoom	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 1	penyalahgunaan pihak lain	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	tidak terbatas
42	Kode akses Webserver	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 2	penyalahgunaan pihak lain	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	tidak terbatas
43	Kode akses Control panel website	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 3	penyalahgunaan pihak lain	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	tidak terbatas
44	Kode akses Sosmed	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 4	penyalahgunaan pihak lain	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	tidak terbatas
45	Dokumen Perundingan Perjanjian : Request/ offer list	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (f)	Bila dibuka untuk publik akan merugikan kepentingan hubungan luar negeri dalam segi posisi, daya tawar, dan strategi dalam proses negosiasi (perundingan) perjanjian	Mencegah diketahuinya posisi/daya tawar Indonesia oleh negara lain dalam perundingan sehingga kepentingan nasional dapat tercapai	Sampai perjanjian berakhir
46	Dokumen Perundingan Perjanjian : Masukan posisi runding	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (f)	Bila dibuka untuk publik akan merugikan kepentingan hubungan luar negeri dalam segi posisi, daya tawar, dan strategi dalam proses negosiasi (perundingan) perjanjian	Mencegah diketahuinya posisi/daya tawar Indonesia oleh negara lain dalam perundingan sehingga kepentingan nasional dapat tercapai	Sampai perjanjian berakhir
47	Dokumen Perundingan Perjanjian : Laporan hasil putaran perundingan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (f)	Bila dibuka untuk publik akan merugikan kepentingan hubungan luar negeri dalam segi posisi, daya tawar, dan strategi dalam proses negosiasi (perundingan) perjanjian	Mencegah diketahuinya posisi/daya tawar Indonesia oleh negara lain dalam perundingan sehingga kepentingan nasional dapat tercapai	Sampai perjanjian berakhir
48	Dokumen Perundingan Perjanjian : Summary of Discussions (SoD)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (f)	Bila dibuka untuk publik akan merugikan kepentingan hubungan luar negeri dalam segi posisi, daya tawar, dan strategi dalam proses negosiasi (perundingan) perjanjian	Mencegah diketahuinya posisi/daya tawar Indonesia oleh negara lain dalam perundingan sehingga kepentingan nasional dapat tercapai	Sampai perjanjian berakhir

49	Dokumen Perundingan Perjanjian : <i>Agrees Minutes</i>	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (f)	Bila dibuka untuk publik akan merugikan kepentingan hubungan luar negeri dalam segi posisi, daya tawar, dan strategi dalam proses negosiasi (perundingan) perjanjian	Mencegah diketahuinya posisi/daya tawar Indonesia oleh negara lain dalam perundingan sehingga kepentingan nasional dapat tercapai	Sampai perjanjian berakhir	
50	Rancangan dokumen perjanjian FTA/PTA/EPA dan kesepakatan internasional lainnya berupa draf : MoU	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (f) dan (i)	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Untuk menghindari polemik di masyarakat dikarenakan informasi yang belum pasti	Hingga diterbitkannya kesepakatan/perjanjian	
51	Rancangan dokumen perjanjian FTA/PTA/EPA dan kesepakatan internasional lainnya berupa draf : <i>Draft text agreement</i>	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (f) dan (i)	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Untuk menghindari polemik di masyarakat dikarenakan informasi yang belum pasti	Hingga diterbitkannya kesepakatan/perjanjian	
52	Rancangan dokumen perjanjian FTA/PTA/EPA dan kesepakatan internasional lainnya berupa draf : <i>Leader's Declaration</i>	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (f) dan (i)	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Untuk menghindari polemik di masyarakat dikarenakan informasi yang belum pasti	Hingga diterbitkannya kesepakatan/perjanjian	
53	Rancangan dokumen perjanjian FTA/PTA/EPA dan kesepakatan internasional lainnya berupa draf : <i>Chair Summary</i>	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (f) dan (i)	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Untuk menghindari polemik di masyarakat dikarenakan informasi yang belum pasti	Hingga diterbitkannya kesepakatan/perjanjian	
54	Data utilisasi Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi dan Deklarasi Asal Barang (DAB)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama masih tersimpan	
55	Data nilai dan penambahan jumlah produk industri pengolahan non migas yang diekspor	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama masih tersimpan	
56	Rancangan peraturan perundang-undangan atau Keputusan Menteri terkait implementasi atau teknis pelaksanaan FTA/PTA/EPA	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (i)	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Untuk menghindari polemik di masyarakat dikarenakan informasi yang belum pasti	Hingga diterbitkannya peraturan perundang-undangan/keputusan	
57	Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (i)	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi	Untuk menghindari polemik di masyarakat dan mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Hingga audit selesai	
58	Data Peserta Penerima Beasiswa	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas	
59	Modul Diklat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	selain peserta bisa mengakses materi diklat	memastikan hanya peserta yang bisa mengakses materi diklat	Tidak terbatas	
60	Biodata Pejabat Fungsional Bidang Industri	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas	
61	Daftar dan Rincian data pribadi dari Perusahaan Industri pelanggan Lspro dalam aplikasi SISIRO	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan mencegah persaingan bisnis yang tidak sehat dikalangan pelanggan	Aktif	Tidak terbatas
62	Pengelolaan sarana Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Topologi jaringan	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 1	1. Dapat mengganggu operasional dan konektivitas. 2. Dapat mengganggu sistem	dapat melindungi operasional, konektivitas TIK	selama berlaku	
63	Pengelolaan sarana Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Layout Infrastruktur	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 2	1. Dapat mengganggu operasional dan konektivitas. 2. Dapat mengganggu sistem	dapat melindungi operasional, konektivitas TIK	selama berlaku	

64	Pengelolaan sarana Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Code Aplikasi	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 3	1. Dapat mengganggu operasional dan konektivitas. 2. Dapat mengganggu sistem	dapat melindungi operasional, konektivitas TIK	selama berlaku	
65	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai	1. Pasal 17 huruf a dan huruf l Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat menghambat proses penegakan hukum	1 (satu) tahun diberikan berupa rekapitulasi pengaduan	
66	Dokumen pemberhentian pegawai kontrak/honorar dari jabatan struktural	UU No 14 th 2008 huruf H angka 4	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas	
67	Aset animasi/hasil karya tenant Inkubasi Bisnis BDI Denpasar/mitra industri	Pasal 17 huruf (b) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 44 huruf (b) UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai masa berlaku	Selamanya
68	Data pelapor pengaduan pelayanan	Pasal 17 huruf (a) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 44 huruf (h) UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan informasi data, pengungkapan data yang bersifat rahasia, menghambat proses penegakan hukum	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai masa berlaku	Inaktif
69	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) tahap I, II atau PHO tahap I, II	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 ayat 1	Informasi tersebut dapat diketahui pihak tertentu (perusahaan pelaksana pekerjaan/pemenang lelang)	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	5 tahun	
70	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 ayat 3	Informasi bernilai ekonomi dan dijaga kerahasiannya karena informasi tersebut dapat digunakan menjalankan usaha/kegiatan yang bersifat komersial	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	5 tahun	
71	Dokumen Perangkat Asesment dan hasil asesment peserta LSP-P1	Pedoman BNSP 201 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi	Informasi bersifat rahasia karena hanya boleh diketahui pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	3 tahun	
72	Sistem Keamanan Website / Sistem Informasi Akademik (Sisformik) pada Politeknik ATI Makassar	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 2	Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, suatu informasi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Permanen	
73	Hasil assessment lembaga penilaian kesesuaian	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Permanen	
74	Data Binaan Ditjen ILMATE seperti: Data Stok Barang	UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal	
75	Data Binaan Ditjen ILMATE seperti: Data legalitas Per Perusahaan	UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal	
76	Data Binaan Ditjen ILMATE seperti: Data Realisasi Import atau Expor per perusahaan	UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal	
77	Data Binaan Ditjen ILMATE seperti: Data Exportir/Importis yang memuat nilai dan volume	UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal	
78	Data Binaan Ditjen ILMATE seperti: Data Penggunaan energi per perusahaan	UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal	

79	Pilot Project/ Rancangan Roadmap dalam Proses Kerjasama dengan Instansi lain atau masih dalam pembahasan kecuali yang di realease resmi oleh Kemenperin. Contoh Pilot Project/Roadmap Ammdes Electric Motorcycle dan mobil baterai sharing Peta jalan pengembangan flexi engine berbasis biofuel Ketenagalistrikan/pembangkit Smelter/B3 Indonesia Manufacturing Center Ventilator Roadmap Industri Baja Nasional	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf i	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal
80	Segala sesuatu terkait IMEI (sistem, coding, backbone, backoffice, server) kecuali yang di realease resmi oleh Kementerian Perindustrian (seperti informasi checking Imei)	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 1	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal
81	Dokumen dan Berita Acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008	Penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	2 tahun
82	Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf h	Penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	2 tahun
83	Surat-surat atau dokumen Urusan Akuntansi Aset di AK-Tekstil Solo yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan.	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008	Penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	1 tahun
84	Dokumen kepemilikan tanah	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008	Penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama masih berlaku
85	Dokumen rincian HPS	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Terjadinya kemungkinan persaingan usaha tidak sehat pelanggaran etika pengadaan barang/jasa	Mengacu pada UU 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi publik bahwa informasi dimaksud dapat mengungkap rahasia pribadi/badan publik dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
86	Dokumen khusus sengketa pengadaan barang/jasa	UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi/badan hukum	Mengacu pada UU 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi publik bahwa informasi dimaksud dapat mengungkap rahasia pribadi/badan publik dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
87	Laporan data industri perusahaan	UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 ayat b	Penyelagunaan Informasi data perusahaan dan persaingan industri yang tidak sehat	Mengacu pada UU 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi publik bahwa informasi dimaksud dapat mengungkap rahasia pribadi/badan publik dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
88	Dokumen verifikasi teknis perizinan berusaha perusahaan	UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 ayat b	Penyelagunaan Informasi data perusahaan dan persaingan industri yang tidak sehat	Mengacu pada UU 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi publik bahwa informasi dimaksud dapat mengungkap rahasia pribadi/badan publik dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
89	narahubung perusahaan industri	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia dan dapat disalahgunakan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama periode pelaporan
90	Dokumen rincian HPS	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b	Terjadinya kemungkinan persaingan usaha tidak sehat pelanggaran etika pengadaan barang/jasa	Mengacu pada UU 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi publik bahwa informasi dimaksud dapat mengungkap rahasia pribadi/badan publik dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun

91	Dokumen khusus sengketa pengadaan barang/jasa	UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi/badan hukum	Mengacu pada UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bahwa informasi dimaksud dapat mengungkap rahasia pribadi/badan publik dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
92	Data Investasi per perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 poin b	Penyalgunaan Informasi data perusahaan dan persaingan industri yang tidak sehat	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama masih tersimpan di SIINAS
93	Dokumen Legalitas Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 poin b	Penyalgunaan Informasi data perusahaan dan persaingan industri yang tidak sehat	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama masih tersimpan di SIINAS
94	Data Laporan Semester (Tenaga kerja, Produksi, Bahan Baku, Limbah)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 poin b	Penyalgunaan Informasi data perusahaan dan persaingan industri yang tidak sehat	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama masih tersimpan di SIINAS
95	User dan Password Aplikasi	2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Pasal 30 ayat 1,2,3)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Permanen
96	Dokumen BMN	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	sampai dengan dokumen final	dapat diberikan apabila untuk keperluan audit, proses penegakan hukum dan atau keperluan lain
97	Laporan kegiatan yang terkait dengan hubungan luar negeri/negosiasi internasional	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (f)	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi	Untuk menghindari polemik di masyarakat dan mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama masih tersimpan
98	Draft/proses/Data penanganan kasus industri, baik berupa kasus anti dumping, subsidi, dan safeguard	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf i	Menimbulkan keresahan masyarakat, karena data dan informasi masih belum final, sewaktu-waktu dapat berubah	Mencegah timbulnya keresahan masyarakat, karena data dan informasi masih belum final, sewaktu-waktu dapat berubah sehingga perlu dirahasiakan	Hingga laporan final diterbitkan
99	Draft dokumen MOU kerjasama Industri dalam dan luar negeri	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf i	- Memorandum atau surat-surat antar badan publik/intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan - Berpotensi mengganggu hubungan luar negeri.	- Memorandum atau surat-surat antar badan publik/intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan - Mencegah adanya potensi gangguan hubungan luar negeri.	Setelah perjanjian berakhir
100	Draft/proses/Data penanganan kasus industri, baik berupa kasus anti dumping, subsidi, dan safeguard	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf i	Menimbulkan keresahan masyarakat, karena data dan informasi masih belum final, sewaktu-waktu dapat berubah	Mencegah timbulnya keresahan masyarakat, karena data dan informasi masih belum final, sewaktu-waktu dapat berubah sehingga perlu dirahasiakan	Hingga laporan final diterbitkan
101	Draft dokumen MOU kerjasama Industri dalam dan luar negeri	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf i	- Memorandum atau surat-surat antar badan publik/intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan - Berpotensi mengganggu hubungan luar negeri.	- Memorandum atau surat-surat antar badan publik/intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan - Mencegah adanya potensi gangguan hubungan luar negeri.	Setelah perjanjian berakhir
102	Dokumen Penawaran Lelang	UU. No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 ayat 3, UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Dapat mengungkap rahasia perusahaan	Informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat	Tahun berjalan (hingga berakhirnya kegiatan lelang) sampai dengan ditetapkan pemenang lelang dan masa sanggah berakhir
103	Dokumen perusahaan yang menjadi pelanggan sertifikasi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Dapat mengungkap rahasia perusahaan	Informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.	Sesuai retensi arsip
104	Dokumen hasil audit, pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, sampling, uji profisiensi, validasi dan verifikasi	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mencegah terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai retensi arsip

105	video materi pelatihan	- UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf p - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atas kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya	selama kegiatan pelatihan masih berlangsung
106	Proses hingga hasil karya desain batik	- UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf g - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atas karya seni terapan	selama masih berlaku
107	Source code	- UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf s - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atas karya berupa program komputer	Selama masih digunakan
108	Sistem Database	- UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf s - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atas karya berupa program komputer	Selama masih digunakan
109	Evaluasi organisasi dan tata kerja	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selama masih berlaku
110	Data Temuan /Hasil Audit Mutu Internal	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi datakelembagaan	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
111	Daftar data pribadi dari Perusahaan Industri peserta Penghargaan Industri Hijau	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
112	Rincian data pribadi dari Perusahaan Industri peserta Penghargaan Industri Hijau	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak	
113	Daftar data pribadi dari Perusahaan Industri pemohon Sertifikasi Industri Hijau	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak	
114	Rincian data pribadi dari Perusahaan Industri pemohon Sertifikasi Industri Hijau	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
115	Data isian Form Self Assessment Perusahaan Industri peserta Penghargaan Industri Hijau	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mencegah terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Selama data tersimpan di SIINas
116	Profil lengkap perusahaan pengusul dalam seleksi penghargaan Rintisan Teknologi Industri	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Sesuai jangka retensi arsip
117	Daftar dari perusahaan pengusul dalam seleksi PINOTI	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	1 Tahun setelah program PINOTI selesai
118	profil lengkap perusahaan pengusul dalam seleksi PINOTI	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Sesuai jangka retensi arsip
119	daftar dari perusahaan pendampingan kegiatan DAPATI	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	1 Tahun setelah program DAPATI selesai
120	Profil lengkap perusahaan pendampingan kegiatan DAPATI	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Sesuai jangka retensi arsip

121	Daftar dari perusahaan pengusul assesment INDI 4.0 dan National Lighthouse	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	1 Tahun setelah assesment selesai
122	profil lengkap perusahaan pengusul assesment INDI 4.0 dan National Lighthouse	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Sesuai jangka retensi arsip
123	Hasil assesment perusahaan peserta INDI 4.0 dan National Lighthouse	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap hasil evaluasi kapabilitas dan kemampuan perusahaan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Sesuai jangka retensi arsip
124	MoU/SPKS (Surat Perjanjian Kerja Sama) untuk Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri yang masih dalam proses	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Munculnya persaingan tidak sehat	Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Selama masa berlaku kerjasama
125	Dokumen penelitian SPK dan hasil litbangyasa dengan Industri	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	5 tahun
126	Data Profil Pelanggan/Data Profil Peserta Pelatihan	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia dan dapat disalahgunakan	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Sesuai jadwal retensi arsip
127	Topologi dan konfigurasi jaringan perkantoran dan data center termasuk di dalamnya alokasi alamat IP, sistem keamanan elektronik, source code dan konfigurasi aplikasi	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 2	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengganggu perlindungan hak dan kekayaan intelektual dan penyalahgunaan hak akses.	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama masih digunakan/bertaku
128	Kertas kerja audit BPK maupun Inspektorat Jendral	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17j : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	informasi menjadi terbuka setelah pengesahan dari auditor / lembaga keuangan	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan karena data dan informasinya masih bisa berubah	Sesuai jangka retensi arsip
129	Laporan Aktualisasi Peserta Diklatsar	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Sesuai jangka retensi arsip
130	Data KTP yang tercetak di Sertifikat Peserta Diklat	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mencegah terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai jangka retensi arsip
131	Hak akses penggunaan aplikasi SAKTI	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 2	Penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama hak akses masih digunakan
132	Rincian nilai LKE penilaian Zona Integritas (ZI), SAKIP maupun RB	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan karena data dan informasinya masih bisa berubah	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Sampai dengan pengumuman hasil akhir
133	Data Profil lengkap Juara Kompetisi IFCC	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia dan dapat disalahgunakan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	5 Tahun
134	Data Profil lengkap Tenant IBT Alas Kaki	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia dan dapat disalahgunakan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	5 Tahun
135	Data Profil Pclanggan Pengujian Alas Kaki	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia dan dapat disalahgunakan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	5 Tahun
136	Laporan Hasil Uji Alas Kaki	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mencegah terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Tidak terbatas

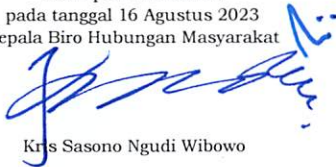
137	Data Profil Pelanggan/Data Profil Peserta Pelatihan	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia dan dapat disalahgunakan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Sesuai jadwal retensi arsip
138	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin a-j Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia dan dapat disalahgunakan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	30 tahun
139	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari:				
	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b-Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
138	2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama proses pemilihan berlangsung
139	3. Spesifikasi Teknis;				
140	4. Rancangan Kontrak;				
141	5. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;				
142	6. Daftar Kuantitas dan Harga;				
143	7. Gambar Rancangan Pekerjaan;				
144	8. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	-Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
145	9. Dokumen Penawaran Penyedia:				
146	a. Surat Penawaran Penyedia;	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b -Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
147	b. Penawaran teknis;	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.	- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.	a. Penawaran Teknis: 10 tahun
148	c. Penawaran Harga;		-Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	-Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	b. Penawaran Harga: Selama proses pemilihan berlangsung
149	d. Rincian Harga Penawaran;	-Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			c. Rincian Harga Penawaran: 10 tahun
150	e. Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi).	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya			d. Isian Kualifikasi: Selama proses pemilihan berlangsung
151	f. Dokumen administrasi				e. Isian Kualifikasi: 1 tahun
152	10. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b -Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah -Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	f. Dokumen administrasi: 1 tahun

153	11. Berita Acara Pemberian Penjelasan;	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b dan pasal 17			Selama proses pemilihan berlangsung
154	12. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;	h "-Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.	-Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.	
155	13. Jawaban Sanggah;	-Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"	-Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	-Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	
156	14. Jawaban Sanggah Banding;				
157	15. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;				
158	16. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b "-Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
159	17. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)	-Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"			
160	18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;				Selama proses pemilihan berlangsung
161	19. Surat Perjanjian Kemitraan;	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama proses pemilihan berlangsung dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku
162	20. Surat Perjanjian Swakelola.				Selama proses pelaksanaan kegiatan selesai dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku.
163	Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:				
164	1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
165	2. Surat Tagihan;	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j			10 tahun
166	3. Surat Perintah Membayar (dilengkapi invoice, faktur pajak, dan copy jaminan pemeliharaan);	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
167	4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);	3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			

168	5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
169	6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);	Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
170	7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b -Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan
171	8. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan
172	9. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over				
173	Seluruh Nama (Nama PPK, Nama Direktur, Nama Ketua dan Anggota Pokja, Nama Pemegang Saham) pada dokumen pengadaan barang dan jasa	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun
174	Tanda tangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun
175	Kode (Barcode, QRCode)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun
176	Alamat pribadi/perseorangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun
177	Laporan progress pekerjaan yang mengandung HKI pada dokumen PHO	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	30 Tahun
178	Surat undangan pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (a)	menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dapat menghambat proses penegakan hukum	1 Tahun
179	Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi 1. Nomor (No.surat, NPWP, NIP) 2. Nominal (nilai penawaran) 3. Nama (Direktur, PPK, Ketua dan Anggota pokja) 4. Tanda tangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun
180	Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) 1. Nomor (No surat) 2. Nominal (Nilai penawaran)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun
181	Dokumen Penyedia 1. Nama (direktur, pemegang saham) 2. Tanda tangan 3. Seluruh nomor (No surat)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun
182	Dokumen Bill of Quantity 1. Nominal (harga satuan, jumlah harga)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun
183	Dokumen Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) 1. Seluruh nomor (no. surat, NIP) 2. Nama (PPK, Direktur) 3. Tanda tangan 4. Nominal pada dokumen SPPBJ	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun

184	Dokumen Copy Jaminan Pelaksana 1. QR code 2. Nomor (No. Bond, No. surat, No. kontrak) 3. Nominal (Jaminan) 4. Seluruh nama (PPK, Direktur) 5. Alamat 6. Tanda tangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun
185	Dokumen Copy Jaminan Uang Muka 1. QR code 2. Nomor (No. Bond, No. surat, No. kontrak) 3. Nominal (Jaminan) 4. Seluruh nama (PPK, Direktur) 5. Alamat 6. Tanda tangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun
186	Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) 1. Seluruh nomor (No. surat, NIP, rekening) 2. Nama (PPK, Direktur, nama pt bukan pemenang tender) 3. Tanda tangan 4. Alamat 5. Isi surat yang menyatakan jenis surat, nomor dan tanggal, nominal, kode kegiatan 6. Tanda tangan 7. Laporan progress pekerjaan yang mengandung HKI pada dokumen PHO	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun
187	dokumen Final Hand Over (FHO) 1. Seluruh nomor (No. surat, NIP) 2. Nama (PPK, Direktur) 3. Tanda tangan 4. Alamat 5. Isi surat yang menyatakan jenis surat, nomor dan tanggal, nominal, kode kegiatan 6. Tanda tangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun
188	Bukti Potong Pajak	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2023
Kepala Biro Hubungan Masyarakat



Krs Sasono Ngudi Wibowo